

Tema

**ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN KETIMPANGAN
ANTAR DAERAH (*BETWEEN AND WITHIN*) DI PROVINSI LAMPUNG**



**KESENJANGAN ANTARA KABUPATEN/KOTA DAN OPTIMALISASI
PROGRAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Capaian pembangunan di suatu daerah ditentukan ketersediaan faktor sumber daya pembangunan di daerah tersebut, seperti sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), kapasitas fiskal, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahannya. Perbedaan faktor tersebut berpeluang menimbulkan ketimpangan antar daerah. Alih-alih sumber daya suatu daerah tidak dikelola dengan baik, kesenjangan daerah tersebut dengan daerah lainnya akan semakin jauh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi kesenjangan antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan Indeks Williamson, serta identifikasi sektor dan subsektor unggulan kabupaten/ kota dengan menggunakan metode Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan perbedaan yang tidak signifikan, kecuali Kota Bandar Lampung. Dari temuan tersebut, pemerintah kabupaten dan kota harus berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efektivitas pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, agar dapat mengejar kemajuan daerah yang lain, dengan menciptakan iklim yang kondusif dan kebijakan yang tepat, sehingga ketimpangan antara daerah di Provinsi Lampung dapat diperkecil sekaligus mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

Kata kunci: *ketimpangan, Williamson, Klassen, optimalisasi.*

KATA PENGANTAR

Salah satu tantangan desentralisasi adalah pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi mempersempit kesenjangan antardaerah. Potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah seyogianya dapat dikelola secara optimal, sinergis, dan terintegrasi antara satu kabupaten/kota dengan daerah lainnya. Ini menjadi tugas pemerintah provinsi selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat, untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; serta memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Sinergi antardaerah perlu lebih dikedepankan. Pendekatan pembangunan perlu diarahkan menjadi lebih kolaboratif dan integratif. Harapannya, seluruh potensi dan sumber daya (*resources*) daerah dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Kajian ini menunjukkan ketimpangan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam katagori sedang. Potensi untuk semakin senjang perlu diantisipasi sejak dini. Terlebih melihat masih relatif tingginya angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Strategi optimalisasi fiskal daerah perlu diperkuat dalam pengelolaan potensi dan sumber daya daerah, dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat, dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik. Semoga kajian ini bisa menjadi salah satu referensi dalam perencanaan pembangunan.

**BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG
KEPALA**

Ir. PRIHATONO G. ZAIN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN UMUM DAERAH	7
2.1. Sekilas Potensi Provinsi Lampung	7
2.2. Sekilas RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	10
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	22
3.2. Kerangka Pemikiran	23
BAB IV PEMBAHASAN	25
4.1. Pertumbuhan Ekonomi	25
4.2. Ketimpangan Ekonomi	29
4.3. Indeks Theil & Williamson	33
4.4. Tipologi Klassen	37
BAB V HASIL PEMBAHASAN	46
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	52
6.1. Kesimpulan	52
6.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki dua dasawarsa implementasi desentralisasi dan otonomi daerah sebagai amanah konstitusi dan perwujudan agenda reformasi, berbagai permasalahan masih terjadi dan belum terpecahkan. Desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan proses pembangunan kepada masyarakat, diterjemahkan dalam kinerja dan performa yang berbeda-beda di daerah-daerah otonom. Desentralisasi belum ditopang sepenuhnya dengan kapasitas dan kemampuan yang tinggi di semua jenjang pemerintahan daerah dalam menerjemahkan pelimpahan kewenangan dalam bentuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, inovatif, dan akuntabel. Kesenjangan kinerja pembangunan dan pemerintahan di daerah-daerah otonom masih terlihat jelas secara nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Termasuk penyerahan kewenangan dalam hal pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah sebagai wujud desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta dapat mendukung dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi (Saragih, 2003).

Pelimpahan kewewenangan pengelolaan keuangan tersebut diarahkan untuk mendorong pemerintah daerah agar mandiri, mampu menggali potensi daerahnya sebagai sumber penerimaan, serta mampu mengelola keuangan dan mengalokasikan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kondisi daerah dengan karakter, potensi, dan sumber daya yang beragam menimbulkan perbedaan kemampuan dan kinerja masing-masing daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Juga, kemampuan finansial pada masing-masing daerah otonom. Desentralisasi dan otonomi daerah belum sepenuhnya mampu menjadi katalisator pemerataan dalam menjawab persoalan kesenjangan antar daerah.

Data indeks gini rasio berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia menunjukkan ketimpangan lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan dibanding perdesaan. Gini rasio adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang dihitung dengan skala 0 sampai 1. Bila angka gini rasio mendekati nilai 1 berarti semakin timpang, sementara bila gini ratio mendekati nilai 0 maka ekonomi semakin merata. Gambar 1 di bawah menunjukkan bahwa gini rasio daerah perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Namun, gini rasio perkotaan sejak 2014 sampai 2018 cenderung mengalami penurunan. Sementara gini rasio daerah perdesaan sejak 2016 sampai 2018 terlihat kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Selengkapnya tren gini rasio perkotaan dan perdesaan di Indonesia (2011-2018) ditunjukkan dalam Gambar 1 di bawah ini.

TREN GINI RATIO PERKOTAAN DAN PERDESAAN, PERKOTAAN, DAN PERDESAAN DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2018



Gambar 1. Tren Gini Rasio di Indonesia 2011-2018

Berkembangnya provinsi di Sumatera sejak pelaksanaan desentralisasi diduga mendorong ketimpangan antar daerah yang lebih lebar. Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2003).

Problem ketimpangan menjadi dilema di tengah desakan penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan bukanlah segalanya. Pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan tidak kurang penting untuk dikendepankan sebagai tujuan prioritas pembangunan. Mengurangi kesenjangan juga telah menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebagai agenda aksi global yang telah disepakati 192 negara—termasuk Indonesia—dalam Sidang Umum PBB ke-70 pada 25-27 September 2015. Cita-cita SDGs adalah mewujudkan 17 tujuan, 169 target, dengan 240

indikator pada 2030. Tujuan ke-10 dari 17 tujuan SDGs tersebut adalah mengurangi ketimpang di dalam dan antar negara. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan upaya sinergi pembangunan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah menjadi isu penting, yang jika tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menimbulkan dampak yang semakin buruk dan sulit diatasi. Sejak lama, Gunnar Myrdal, dalam *Economic Theory and Underdeveloped* (1957: 26), menyatakan apabila pemerintah tidak secara aktif campur tangan di dalam kegiatan perekonomian, yang berarti perekonomian diatur penuh mekanisme pasar, maka tingkat pembangunan yang berbeda di antara daerah-daerah akan menimbulkan dampak buruk pada corak pembangunan berikutnya. Dari waktu ke waktu jurang kesejahteraan dan tingkat pembangunan antara daerah kaya dengan daerah miskin akan semakin melebar. Hal ini disebabkan secara umum kegiatan sektor industri, perdagangan, keuangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya di daerah yang kaya akan lebih lancar dan lebih menguntungkan dibanding di daerah yang lebih miskin. Konsentrasi aktivitas ekonomi yang menyedot sumber daya akan terjadi di daerah yang lebih kaya (perkotaan).

Oleh karena itu, pembangunan akan tetap dan terus lebih cepat terjadi di daerah yang lebih kaya, dibanding daerah yang lebih miskin, sehingga menyebabkan semakin lebarnya jurang kesejahteraan antar daerah tersebut. Kesenjangan ini dapat mengancam kohesi sosial masyarakat. Isu keadilan akan mengemuka, seiring semakin tajamnya ketimpangan ekonomi. Salah satu akibat melebarnya kesenjangan kesejahteraan antar daerah adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah-daerah tersebut. Keberhasilan capaian program pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kinerja pemanfaatan potensi serta sumber daya yang tersedia. Kenyataannya, ketersediaan potensi dan sumber daya serta pemanfaatannya bervariasi di antara daerah, seperti di kabupaten/kota yang ada di satu provinsi, juga antar provinsi.

Karena itu, pemerintah daerah dituntut mengambil kebijakan yang tepat dan program yang efektif dalam mencegah semakin melebarnya kesenjangan antar wilayah (*regional disparity*) tersebut. Potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah harus dapat dikelola secara optimal, sinergis, dan terintegrasi antara satu kabupaten/kota dengan daerah lainnya. Ini menjadi tugas pemerintah provinsi selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dalam mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada diwilayahnya; serta memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota diwilayahnya.

Pendekatan perencanaan pembangunan harus lebih berorientasi mempersempit kesenjangan antar daerah tersebut. Sinergi antar daerah perlu lebih dikedepankan. Pendekatan sektoral perlu direvisi dan diarahkan menjadi lebih kolaboratif dan integratif. Dengan demikian, seluruh potensi dan sumber daya (*resources*) daerah diharapkan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

1.2. Permasalahan

Disparitas pembangunan di kabupaten/kota perlu menjadi perhatian (prioritas) pemerintah Provinsi Lampung untuk menjembatani daerah-daerah yang relatif tertinggal, sehingga kesenjangan dapat diminimalisasi. Dibutuhkan kebijakan dan pendekatan yang tepat dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjalankan tugasnya mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; serta memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Untuk itu, identifikasi kondisi kesenjangan antar kabupaten/kota menjadi penting. ***Pertanyaan penelitian (research question) kajian ini adalah, bagaimana kondisi kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung,***

dan kebijakan apa yang tepat untuk mengurangi kesenjangan tersebut?
Pertanyaan penelitian ini akan diulas dan dijawab melalui kajian ini.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang kesenjangan antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung ini ditujukan untuk:

1. Menghitung kesenjangan perekonomian di antara kabupaten/kota se-Provinsi Lampung melalui Indeks Williamson.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis sektor dan subsektor unggulan kabupaten/kota dengan menggunakan metode Tipologi Klassen, yang terdiri dari empat tipologi untuk menjelaskan kondisi setiap kabupaten/kota, yaitu:
Tipologi I : Area dengan pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang cukup tinggi (*hight growth and income*). Area ini disebut juga area cepat maju dan tumbuh.
Tipologi II : Area dengan katagori maju tetapi tertekan (*high income but low growth*).
Tipologi III : Area termasuk katagori berkembang cepat (*hight growth but low income*).
Tipologi IV : Area yang relatif tertinggal (*low growth and low income*).
3. Mengidentifikasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam rangka mengurangi ketimpangan antar daerah.

BAB II

TINJAUAN UMUM DAERAH

2.1. Sekilas Potensi Provinsi Lampung

Lampung kaya sumber daya alam. Beragam komoditi tersebar di hampir semua daerahnya. Lanskap alam Lampung juga indah; potensi pariwisata yang sangat besar dianugerahkan Sang Pencipta kepada kita. Namun, kekayaan alam tersebut belum mampu ditransformasikan secara optimal dalam wujud kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pengelolaan sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan selama ini masih didominasi aspek produksi dan pemasaran yang terbatas layaknya dalam masyarakat agraris. Kultur agraris yang begitu kuat dan belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang kini maju begitu pesat. Investasi pada sektor pengelolaan sumber daya alam juga belum diarahkan meningkatkan hilirisasi komoditi lokal yang memberikan nilai tambah optimal. Infrastruktur yang digesa pembangunannya oleh pemerintah dalam lima tahun terakhir juga tampaknya belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Transformasi ekonomi sebenarnya bisa dimulai dari sektor agraris ini. Pemerataan ekonomi akan lebih efektif melalui transformasi sistem agraris tradisional ke dalam sistem agroindustri dengan mengadopsi perkembangan Iptek dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Industrialisasi pertanian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah di pasar regional dan global. Industrialisasi ini diarahkan untuk membawa sektor pertanian menjadi lebih tangguh dan lebih

optimal memberikan nilai tambah, dengan mengelola sumber daya alam, tenaga kerja, modal, serta memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

Kewenangan otonomi memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun industri lokal berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya daerah. Dalam rangka ini, faktor utama yang harus mendapat perhatian adalah kompetensi SDM, daya saing daerah dengan infrastruktur yang baik, serta dukungan teknologi untuk dapat mengakses pasar regional dan global secara kompetitif. Hal ini sejalan dengan Visi, Misi, dan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024. Dengan Visi "*Rakyat Lampung Berjaya*," yang diterjemahkan dalam enam misi, diharapkan proses industrialisasi pertanian yang menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat Lampung dapat terwujud dan rakyat berjaya.

Dari enam misi Lampung Berjaya 2024, tiga misi pertama terkait langsung dengan sumber daya manusia: SDM yang religus dan berbudaya, SDM aparatur yang berkualitas dan melayani, serta pembangunan SDM secara inklusif yang dimulai sejak masa kanak-kanak. Tiga misi selanjutnya, memberikan arah dalam pembangunan perekonomian daerah melalui pemerataan infrastruktur, pembangunan ekonomi rakyat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan, serta pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sektor pertanian yang mendominasi aktivitas perekonomian di daerah ini perlu lebih diorientasikan pada industrialisasi dengan berbasis pada potensi lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Industrialisasi pertanian merupakan transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern dengan orientasi nilai tambah optimal yang dihasilkannya. Penerjemahannya harus diikuti dengan adopsi teknologi dan kreativitas dalam mentransformasikan hasil-hasil pertanian sebelum sampai ke pasar akhir (konsumen). Modernisasi distribusi dan pemasaran dalam rantai pasar industri pertanian perlu dibangun. Dukungan investasi untuk riset yang dibutuhkan dalam proses pengolahan (manufaktur) dan pemasaran perlu ditingkatkan. Adopsi teknologi (TIK) akan mendorong berkembangnya industri

pertanian agar produk hilir yang dihasilkannya lebih sesuai dengan keinginan pasar (konsumen). Kedekatan produk hilir industri pertanian dengan selera pasar (*market oriented*), menjadi prasyarat untuk berkembangnya sektor ini. Kesenjangan antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) akibat perbedaan selera konsumen dengan produk yang dihasilkan, dapat diatasi dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi informasi.

Petani harus menjadi satu kesatuan dalam pembangunan industri pertanian. Kedala yang selama ini dihadapi petani, semisal soal akses pupuk dan saprodi, harus difasilitasi dan diatasi. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dan jaringan pemasaran perlu dibangun dan diperkuat bersama, melalui kemitraan usaha pertanian. Pemerintah, dunia usaha dan industri, lembaga penelitian/pendidikan, dan lembaga keuangan perlu memberikan *supporting system* yang lebih kuat untuk mendorong transformasi pertanian tradisional menjadi lebih modern.

Hal tersebut sejalan dengan kecenderungan pembangunan industri modern yang diarahkan untuk terbangunnya proses kolaboratif dalam jangka panjang, antara pemerintah, pelaku usaha dan industri, serta peneliti/akademisi, yang berfokus pada pembelajaran terus-menerus bagaimana menghadapi hambatan dan peluang dalam mengembangkan daya saing usaha/industri. Oleh karena itu, sektor pendidikan memiliki andil penting untuk mendukung upaya tersebut. Lembaga pendidikan kejuruan (vokasi) di daerah perlu meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan industri lokal. Kesenjangan kompetensi SDM dan kebutuhan dunia usaha/industri harus mampu dijembatani melalui lembaga pendidikan yang inklusif dan relevan dengan dunia kerja. Kemitraan lembaga pendidikan dengan industri lokal harus memastikan kesenjangan itu teratasi.

Mengapa pendidikan kita belum mampu menurunkan ketimpangan? Fakta menunjukkan bahwa sekalipun terjadi peningkatan akses pendidikan pada tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi di perdesaan, angkatan kerja tetap didominasi oleh golongan berpendidikan rendah yang sulit menjangkau sektor ekonomi

dengan imbal hasil yang tinggi. Akibatnya, imbal hasil (*return*) tinggi hanya bisa dinikmati oleh sedikit orang berpendidikan tinggi di perdesaan. Di samping itu, adanya stagnasi kenaikan imbal hasil dari jenjang pendidikan SD dan SMP ke SMA, dan selanjutnya ke jenjang pendidikan tinggi (sarjana muda/sarjana), menjadi dorongan bagi tenaga kerja berpendidikan SMA dan sarjana muda/sarjana untuk meninggalkan wilayah perdesaan menuju kota-kota yang lebih maju.

2.2. Sekilas RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka menengah selama lima tahun, sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif (*top down* dan *bottom up*), dan politis.

Pasca-Pilkada yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018 lalu, masyarakat Lampung telah memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk periode 2019-2024, yaitu Bapak Arinal Djunaidi sebagai Gubernur dan Ibu Chusnunia Chalim sebagai Wakil Gubernur, untuk memimpin pembangunan di daerah ini. Visi yang dibawa dan dipilih masyarakat adalah “Rakyat Lampung Berjaya,” dengan enam misi sebagai penerjemahannya. Visi, misi, dan program gubernur dan wakil gubernur terpilih tersebut kemudian diterjemahkan menjadi dokumen pembangunan lima tahunan, yaitu RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.

RPJMD tersebut disusun berdasarkan kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi sekitar, serta kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, juga RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025. Sebelumnya juga telah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung periode sebelumnya (2015-2019), sebagai titik pijak pembangunan lima tahun selanjutnya, selain juga memperhatikan isu-isu internasional (*global*) dan dinamika nasional maupun regional yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan Provinsi

Lampung. Visi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 tersebut adalah:

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

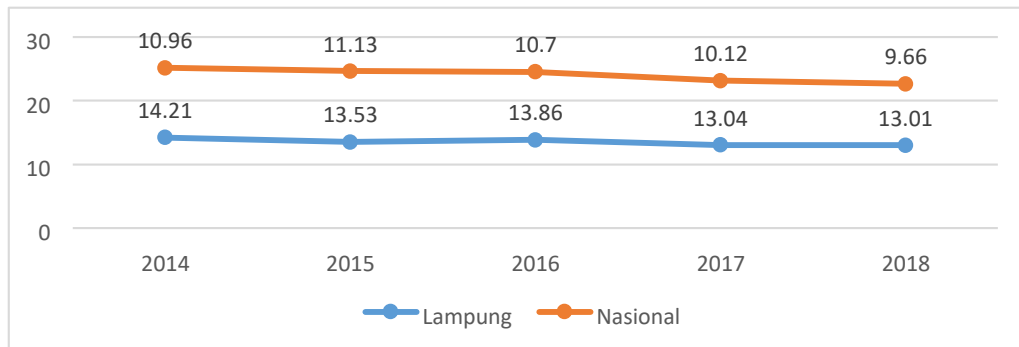
1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif, dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi *direction* untuk tugas-tugas yang harus diemban satuan kerja. Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019–2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Beberapa isu strategis yang tertuang dalam draf RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, antara lain, terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), yang memberikan peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia. Mengingat jumlah penduduk Indonesia terbesar di Asia Tenggara, yaitu hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN, dengan syarat harus didukung investasi dan sumber daya manusia yang memadai. Isu lainnya adalah tentang kerangka pembangunan global *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang kemudian ditindaklanjuti dengan upaya sinergi pembangunan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Pemerintah Provinsi Lampung menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019.

Grafik 1. Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia Tahun 2014 -2018



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Penduduk Provinsi Lampung yang berdasarkan data BPS tahun 2017 berjumlah 8.289.577 jiwa, di mana 13,14% masih dalam kriteria miskin. Angka kemiskinan tersebut masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin secara nasional (Grafik 1). Persoalan tersebut tentu harus segera diatasi melalui program-program pengentasan kemiskinan yang masif. Data jumlah penduduk miskin menurut kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jml Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	Lampung Barat	42,71	14,32
2.	Tanggamus	77,53	13,25
3.	Lampung Selatan	150,11	15,16
4.	Lampung Timur	167,64	16,35
5.	Lampung Tengah	162,38	12,90
6.	Lampung Utara	131,78	21,55
7.	Way Kanan	62,00	14,06
8.	Tulangbawang	44,31	10,09
9.	Pesawaran	71,64	16,48
10.	Pringsewu	44,41	11,30
11.	Mesuji	15,16	7,66
12.	Tulangbawang Barat	21,77	8,11
13.	Pesisir Barat	23,76	15,61
14.	Bandar Lampung	100,50	9,94
15.	Metro	16,06	9,89
	LAMPUNG	1.131,73	13,69

Sumber: Lampung Dalam Angka 2018 (BPS, 2018)

Lampung merupakan provinsi berpenduduk kedua terbesar di Pulau Sumatera dimana 15 orang dari 100 orang penduduk Pulau Sumatera bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Memasuki tahun 2014 Lampung memasuki bonus demografi yang ditandai dengan jumlah persentase rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk yang berada di bawah angka 50%. Keuntungan bonus demografi tersebut adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan, agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana ledakan pengangguran usia produktif.

Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada pada alur laut kepulauan Indonesia dan menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera, membuat daerah ini memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri yang harus mampu dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang optimal, melalui pembangunan sektor infrastruktur, sektor perhubungan, dan sektor ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km), memiliki potensi perekonomian baik dari sektor perikanan, pariwisata maupun perhubungan yang perlu dikelola dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dimulai 2015 memberikan pengaruh terhadap biaya logistik, volume perdagangan dan investasi, yang diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk mengoptimalkan dampak pembangunan jalan tol terhadap peningkatan kesejahteraan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perlu

disertai pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung yang diarahkan pada kawasan produksi dan pasar serta memperkuat infrastruktur pertanian.

Perekonomian global meningkat secara gradual. Peluang ekspor Lampung juga meningkat. Namun, hingga saat ini komoditi ekspor Lampung masih didominasi komoditi batubara, CPO, karet, dan kopi saja. Ini yang membuat ekspor Lampung rentang terhadap fluktuasi harga dan permintaan. Perlu terobosan diversifikasi ekspor, baik jenis komoditi maupun negara tujuan.

Semakin maraknya penggunaan teknologi digital meningkatkan *e-commerce* dapat menjadi pemicu meningkatnya daya kreatif masyarakat dalam membentuk suatu produk baru, dengan cara pemasaran yang baru, yang dapat menjangkau pasar lebih luas, sehingga pada gilirannya meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah. Namun, pada saat yang sama, maraknya *e-commerce* juga mengancam penurunan kebutuhan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan seiring berkembangnya *fintech*.

Provinsi Lampung memiliki dua daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, dengan jumlah keseluruhan daerah tertinggal di Indonesia adalah 122 daerah. Indikator utama penyebab ketertinggalan di dua kabupaten tersebut adalah kemampuan keuangan daerah, ekonomi, dan sarana prasarana. Prioritas percepatan pembangunan di daerah tertinggal adalah penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi mitigasi bencana.

Draf RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 juga memuat isu-isu strategis pada bidang-bidang pembangunan. Seperti, isu strategis bidang penataan ruang, yaitu masih kurang optimalnya penyelenggaraan tata ruang di Provinsi Lampung yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan. Isu strategis bidang keciptakarya adalah belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan

bidang perumahan dan bangunan gedung. Dalam bidang perumahan dan permukiman, isu strategisnya antara lain, masih tingginya angka kepemilikan rumah (*backlog*) bagi rumah tangga dan tingginya kepemilikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Lampung. Perlu dukungan lebih dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sektor sanitasi dan air minum, serta penanganan kawasan kumuh.

Kondisi infrastruktur pertanian banyak yang rusak, merupakan bagian isu bidang pertanian. Kerusakan mencapai 40% untuk kewenangan kabupaten, dan kerusakan jaringan hingga 20% untuk kewenangan provinsi. Masih lemahnya daya saing produk UMKM juga menuntut Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan pelatihan vokasional dan manajemen usaha serta fasilitasi perluasan akses permodalan dan pasar bagi pelaku UMKM, termasuk mendesaknya pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida).

Dalam bidang industri, isu strategis daerah tidak bisa lepas dari dinamika global berupa Revolusi Industri 4.0 yang ditandai maraknya penerapan teknologi dan automasi pada sektor industri. Perkembangan ini perlu diantisipasi, antara lain, melalui penyiapan SDM sektor industri serta pengembangan riset dan teknologi industri. Pembangunan perwilayahan industri (aglomerasi industri) perlu dipercepat, melalui pengembangan Kawasan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung. Juga, tak kalah penting, pemberdayaan Industri Kecil Menengah melalui adopsi teknologi dan *e-commerce*.

Dalam bidang perdagangan, ekspor komoditas Lampung masih tergantung kondisi ekonomi negara tujuan dan harga komoditas yang menyebabkan ekspor fluktuatif. Diperlukan perluasan pasar tujuan ekspor melalui atase perdagangan, ITPC dan Pameran Dagang, serta ekspor komoditi dalam negeri melalui peningkatan kerja sama perdagangan antar daerah dan antarpulau. Perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar di semua kabupaten/kota kini juga menjadi urusan

provinsi. Fungsi ini belum optimal dengan keterbatasan jangkauan dan SDM, sehingga diperlukan penguatan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan pengawasan barang beredar hingga tahap penyidikan dan penyelidikan, sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan terhadap konsumen.

Pariwisata menjadi sektor potensial untuk dikembangkan. Isu strategis bidang pariwisata di daerah ini, antara lain, jumlah kunjungan wisatawan naik signifikan selama lima tahun terakhir. Sayangnya, belum memberi manfaat optimal terhadap pengurangan kemiskinan. Perlu kebijakan zonasi pengembangan pariwisata yang padat modal dan berbasis masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat di sekitar destinasi wisata. Peningkatan SDM profesional bidang pariwisata sangat diperlukan. Selain itu, peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata, kualitas dan kuantitas amenitas pariwisata, serta atraksi di destinasi wisata. Juga pengembangan paket-paket wisata dalam rangka peningkatan promosi bekerja sama dengan ASITA, hotel, penerbangan maupun vendor aplikasi digital.

Isu terkait investasi dan penanaman modal, antara lain, terbatasnya kapasitas fiskal daerah yang membutuhkan alternatif pendanaan pembangunan. Tidak selalu dalam bentuk utang, tetapi juga dalam bentuk investasi. Perlu mengembangkan skema-skema pembiayaan bekerja sama dengan swasta (*public private partnership*) atau lembaga pengelolaan dana jangka panjang dalam skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Skema pembiayaan yang melibatkan dana sosial (*charity*) juga sudah mulai digunakan.

Kinerja investasi di Provinsi Lampung belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari data realisasi PMDN memang baik, tetapi dari sisi realisasi PMA masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah untuk menarik investasi baru, serta mendorong investasi yang sudah ada agar mau mengekspansi usahanya, perlu menjadi perhatian. Peningkatan investasi juga harus dibarengi peningkatan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di samping, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah investasi, serta menjaga hubungan yang harmonis

dengan kalangan dunia usaha dan komunitas, serta melibatkan mereka dalam pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan.

Disparitas pendapatan penduduk di Provinsi Lampung dilihat dari Gini Rasio, ketimpangan pendapatan menunjukkan 0,33 di tahun 2017. Apabila dibandingkan angka nasional sebesar 0,39 masih tergolong lebih rendah, tetapi Indeks Gini diatas 0,3 termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi. Indeks Gini Rasio Lampung selama tiga tahun terakhir *trend* positif cenderung menurun, tetapi penurunannya kurang signifikan. Apabila dilihat dari PDRB perkapita kabupaten/kota, PDRB per kapita kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata PDRB per kapita provinsi yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Tulang Bawang dan Mesuji. Sementara sepuluh kabupaten/kota lainnya, PDRB per kapita dibawah rata-rata provinsi antara lain, yaitu Lampung Barat, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, dan Way Kanan.



Gambar 2. Tren Gini Rasio Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan arah pengembangan kawasan strategis, di mana berdasarkan Draf Revisi RTRW Provinsi Lampung, ada dua kawasan strategis dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Metropolitan Bandar Lampung dan Kawasan Pariwisata terintegrasi wilayah Barat dengan pengembangan subkawasan pendukung, antara lain:

1. Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung;
2. Kawasan pusat pemerintahan kota baru di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kawasan *Aeropolitan* Natar di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kawasan Teluk Lampung di Kabupaten Lampung Selatan,
5. Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran;
6. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
7. Kawasan pendidikan Universitas Lampung–ITERA–UIN Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan; dan
8. Kawasan pendidikan terpadu di Kota Metro.

Rencana lokasi pembangunan kawasan industri di Provinsi Lampung selengkapnya ditampilkan dalam Gambar 3 berikut:

Gambar 3. Arah Pengembangan Kawasan Industri



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2019

Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, ada dua kawasan strategis, yaitu Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman di Kota Bandar Lampung dan Pesawaran; serta Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi di Tanggamus. Selain kawasan strategis tersebut, pengembangan

kawasan industri di Provinsi Lampung juga belum optimal. Terdapat sembilan Kawasan Industri yang akan dikembangkan, yaitu:

1. Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Tanggamus;
2. Pembangunan Kawasan Industri Way Pisang di Lampung Selatan;
3. Pengembangan Kawasan Industri Mesuji;
4. Pengembangan Kawasan Industri Sulusuban di Lampung Tengah;
5. Pengembangan Kawasan Industri Way Kanan;
6. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang Barat;
7. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang;
8. Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL II) di Lampung Selatan;
9. Pengembangan Kawasan Industri Ketibung di Lampung Selatan.

Terkait pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Provinsi Lampung harus dapat *men-design* agar JTTS bermanfaat optimal bagi percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah Provinsi Lampung serta Kabupaten/Kota. Pengembangan kawasan industri harus terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur tersebut. Termasuk, Kawasan Industri Pertahanan yang akan dibangun di Tulang Bawang dan Tanggamus dalam rangka mendukung rencana pemerintah pusat mengembangkan industri pertahanan yang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Pembangunan JTTS tersebut sejalan dengan tujuan peningkatan konektivitas kawasan strategis di Provinsi Lampung. Koneksi infrastruktur yang dibangun dengan wilayah strategis aglomerasi industri, menjadi misi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Aglomerasi industri dibangun dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam mendapatkan dan memanfaatkan faktor-faktor produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, akses pasar regional, serta daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan desain perencanaan terpadu antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan strategis perkotaan, industri, pelabuhan, dan lainnya. Perlu juga sinkronisasi rencana pembangunan infrastruktur untuk

lebih mengoptimalkan pertumbuhan kawasan strategis yang akan dibangun terkait fungsi, lokasi, tahapan, dan anggaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif menggunakan perhitungan Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Analisis kualitatif dilakukan dengan penelaahan terhadap program Pemerintah Provinsi Lampung yang langsung bersentuhan dengan pembangunan kabupaten/kota. Menggunakan data sekunder time series kabupaten/kota di Provinsi Lampung, seperti data PDRB per kapita kabupaten/kota, jumlah penduduk kabupaten/kota, dan data-data terkait lainnya.

Menurut Sjafrizal (2012) Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks Williamson (1965). Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, tetapi indeks ini lazim dipakai dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Formulasi Indeks Williamson yang digunakan yaitu:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \quad 0 < V_w < 1$$

- V_w = Indeks Williamson
 y_i = PDRB per kapita daerah i
 y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
 f_i = Jumlah penduduk daerah i
 n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Formulasi Indeks Williamson:

Williamson mengemukakan model V_w dan V_{uw} untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu.

Pengertian indeks ini adalah sebagai berikut:

Bila mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila mendekati nol berarti sangat merata.

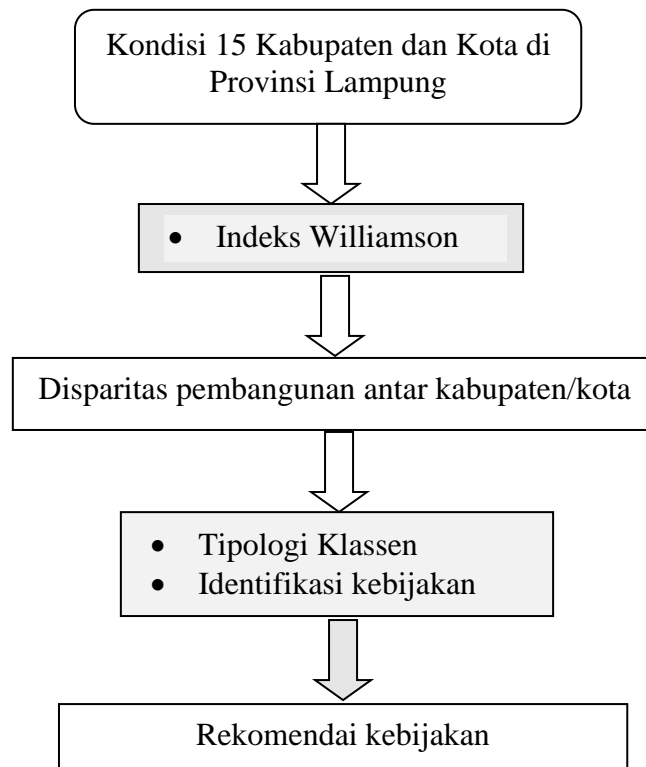
Sumber: Sjafrizal, 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Pengertian Indeks Williamson adalah bila mendekati nilai 1 berarti sangat timpang dan bila mendekati nilai 0 berarti sangat merata. Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dapat digunakan Tipologi Klassen sebagai alat analisis. Sjafrizal (1997: 27-38) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan masing-masing daerah yaitu daerah pertumbuhan cepat (*rapid growth region*), daerah tertekan (*retarded region*), daerah sedang bertumbuh (*growing region*), dan daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*). Kuncoro dan Aswandi (2002: 25-43), misalnya, menggunakan alat analisis ini untuk mengklasifikasikan provinsi-provinsi di Sumatera ke dalam empat kelompok, yaitu (a) *Low growth, high income*; (b) *high growth, high income*; (c) *high growth, low income*; dan (d) *low growth, low income*.

3.2. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan kebijakan dan program pembangunan suatu daerah sangat tergantung kemampuan daerah tersebut memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Dengan keragaman kondisi sumber daya dan infrastruktur di kabupaten/kota dalam satu provinsi, mengakibatkan terjadinya disparitas di antara kabupaten/kota tersebut. Akibatnya, terjadi kesenjangan di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Perlu diidentifikasi kondisi kesenjangan faktual di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk meminimalisirnya melalui kebijakan

dan program yang tepat. Dengan identifikasi ini, diharapkan arah dan prioritas kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Lampung dapat lebih efektif dalam rangka mengatasi ketimpangan di antara kabupaten/kota yang ada. Secara skematik, kerangka pemikiran kajian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah umumnya ditunjukkan dengan angka PDRB. Permasalahan yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi adalah kesenjangan. Korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan ditunjukkan dengan pertumbuhan PDB dan pertumbuhan kesenjangan distribusi pendapatan; semakin besarnya perbedaan antara rakyat miskin dan kaya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat pertambahan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja atau aktifitas dari berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus sederhana:

$$g = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Bila pertumbuhan ekonomi (g) adalah negatif berarti Produk Domestik Regional Bruto ($PDRB_1$) tahun pengamatan tertentu lebih kecil dari Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya ($PDRB_0$), sebaliknya bila pertumbuhan ekonomi (g) adalah positif berarti Produk Domestik Regional Bruto ($PDRB_1$) tahun pengamatan tertentu lebih besar dari Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya ($PDRB_0$).

Intinya, pendapatan regional tidak selalu meningkat setiap tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian yang terjadi, sebaliknya apabila pertumbuhan negatif berarti terjadi penurunan kinerja dan aktivitas perekonomian.

Menurut Boediono (1985:1) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi, Para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999:141).

Kuznets (1955) yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik (Todaro, 2000:207). Teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Perroux (1970) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama (Arsyad, 1999:147-148). Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian sebagai tingkat perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat. Perbedaan perkembangan dan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh, sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan. Banyak studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pada posisi yang dikotomis. Namun, penelitian ini tidak mendalami lebih jauh

teori pertumbuhan, melainkan lebih pada aspek ketidakmerataan (kesenjangan) di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Islam dan Khan (1996) menyimpulkan bahwa tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita provinsi-provinsi di Indonesia, konsisten dengan distribusi sumber daya alam dan kegiatan industri yang ada di masing-masing provinsi. Secara spesifik, porsi dan variasi distribusi pendapatan di daerah, berhubungan secara positif dengan variasi distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Adanya variasi distribusi penguasaan faktor-faktor produksi antar daerah tersebut, menuntut pemerintah daerah lebih efektif lagi dalam pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan daya saing daerah bersangkutan serta kesejahteraan warganya secara luas.

Tabel 1. Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota 2014-2018

Kabupaten Kota	Laju PDRB ADHK Menurut Kabupaten Kota (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Lampung Barat	5.56	5.32	5.01	5.03	5.14
Tanggamus	5.90	5.50	5.18	5.19	5.02
Lampung Selatan	5.80	5.38	5.22	5.46	5.26
Lampung Timur	2.87	4.58	4.54	4.63	3.78
Lampung Tengah	5.68	5.38	5.61	5.27	5.42
Lampung Utara	5.80	5.43	5.10	5.21	5.33
Way Kanan	5.67	5.27	5.12	5.11	5.21
Tulang Bawang	5.54	5.02	5.42	5.45	5.49
Peswaran	5.59	5.03	5.07	5.01	5.09
Pringsewu	5.75	5.22	5.04	5.11	5.03
Mesuji	5.69	5.23	5.10	5.20	5.31
Tulang Bawang Barat	5.50	5.35	5.27	5.55	5.46
Pesisir Barat	5.10	4.94	5.30	5.33	5.35
Bandar Lampung	7.05	6.33	6.43	6.28	6.21
Metro	6.13	5.87	5.90	5.66	5.69
Jumlah	5.08	5.13	5.14	5.16	5.25

Sumber: BPS, 2019

PDRB per kapita merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu provinsi, dimana jika semakin besar PDRB per kapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya, apabila PDRB semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban yang terus meningkat karena banyak penduduk dari daerah lain terus berpindah ke daerah tersebut.

Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumber daya yang potensial terus masuk ke sana. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan daerah pusat pertumbuhan mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih tinggi karena didukung sumber daya potensial yang telah berpindah dari daerah dengan pertumbuhan yang lebih rendah.

Kondisi serupa terjadi di Provinsi Lampung. Sebagaimana tergambar dalam Tabel 1 di atas yang memuat laju pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung secara *time series* (2014-2018). Perbedaan potensi dan sumber daya yang dimiliki kabupaten dan kota di Provinsi Lampung menimbulkan variasi tingkat pembangunan ekonomi maupun pendapatan daerah. Hal ini bisa dilihat dari tingkat perekonomian masing-masing kabupaten/kota, terutama dari struktur PDRB, sebagai indikator untuk melihat kondisi kesenjangan yang terjadi dalam provinsi tersebut. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota, kesenjangan antar daerah masih terjadi di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi dengan laju pertumbuhan 6,21 pada 2018, sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun yang sama terjadi di Kabupaten Lampung Timur, yaitu 3,78.

4.2. Ketimpangan Ekonomi

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan melalui kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta serta pemberdayaan masyarakat, mendorong tumbuhnya inisiatif dan prakarsa warga, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, otonomi daerah dilaksanakan dengan asas desentralisasi, berupa memberikan kewenang otonomi kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengurus serta mengelola potensi juga sumber daya wilayahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Konsekuensinya pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi juga diikuti kebijakan desentralisasi fiskal.

Kesenjangan antar wilayah menjadi fenomena di balik kemajuan suatu wilayah dan pertumbuhan ekonomi, hingga kini masih menjadi soal mendasar dalam pembangunan. Ketimpangan wilayah menyangkut ketimpangan secara ekonomi dan sosial. Ketimpangan ekonomi lebih mengacu pada distribusi pendapatan per kapita daerah yang kurang merata, sedangkan ketimpangan sosial lebih sebagai akibat dari terjadinya ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan definisi OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2003), kesenjangan wilayah (*regional disparities*) menggambarkan perbedaan intensitas yang dimanifestasikan melalui fenomena ekonomi yang diamati pada sejumlah wilayah dalam satu negara. Sedangkan ILO (*International Labour Organization*, 2002) menyebutkan bahwa kesenjangan wilayah adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah. Peneliti lain (Gajdos, 2006) menyebutkan bahwa kesenjangan wilayah adalah perbedaan atau ketidaksamaan karakteristik, fenomena, atau kondisi lokasi dan terjadi minimal di antara dua entitas dari struktur wilayah.

Ketimpangan harus dinilai dari berbagai aspek seperti sosial, kondisi lokasi, politik dan administrasi, kelembagaan, lingkungan, infrastruktur umum, dan lain-lain. Ketimpangan wilayah secara ekonomi, menurut Forbes (1986), yakni kondisi ketimpangan yang mengacu pada distribusi pendapatan per kapita daerah yang kurang merata. Ketimpangan perkembangan wilayah mengacu pada kemajuan masing-masing wilayah berdasarkan pendapatan perkapita wilayahnya.

Berbagai penelitian tentang ketimpangan antar daerah telah banyak dilakukan Kuznets (1954) tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam meneliti kesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara *cross-sectional* dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali (dalam Todaro, 2004).

Menurut Sjafrizal (2008), faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah: (1) Perbedaan kandungan sumber daya alam, (2) Perbedaan kondisi geografis, (3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, (4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, (5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah di suatu daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*).

Faktor Pendorong Ketimpangan



Sumber: Presentasi BPS, 2019.

Gambar 5. Faktor Pendorong Ketimpangan

Fenomena ketimpangan merupakan konsekuensi logis dari orientasi pembangunan dalam era otonomi daerah yang cenderung mengarah pada alokasi sumber daya yang terdapat yang terdapat pada wilayah-wilayah pertumbuhan Tjokrowinoto (1999). *Differensiasi* karakteristik wilayah mengakibatkan adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut, hal ini juga didorong oleh perbedaan kualitas sumberdaya manusia yang ada di berbagai wilayah.

Data BPS (2019) menunjukkan, pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,382. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401. Sedangkan Gini Ratio di perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,317, turun dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,319 dan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,71 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2019 berada pada katagori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,59 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Angka ini menjelaskan tingkat kesenjangan berdasarkan pengeluaran penduduk per kapita dalam satu daerah tertentu.

Potret kesenjangan pengeluaran per kapita di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, ditunjukkan dalam tabel gini rasio Provinsi Lampung sepuluh tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. Gini Rasio Provinsi Lampung 2010-2019

Tahun	Gini Rasio Lampung		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2010 (<i>Semester I</i>)	0,397	0,309	0,360
2011 (<i>Semester I</i>)	0,373	0,340	0,366
2012 (<i>Semester I</i>)	0,396	0,318	0,358
2013 (<i>Semester I</i>)	0,412	0,292	0,356
2014 (<i>Semester I</i>)	0,400	0,290	0,347
2015 (<i>Semester I</i>)	0,403	0,345	0,376
2016 (<i>Semester I</i>)	0,393	0,330	0,364
2017 (<i>Semester I</i>)	0,364	0,297	0,334
2018 (<i>Semester I</i>)	0,367	0,317	0,346
2019 (<i>Semester I</i>)	0,346	0,299	0,329

Sumber: BPS, 2019 (*diolah*)

Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Gini Rasio nol berarti

ketimpangan pengeluaran merata sempurna, atau jumlah pengeluaran setiap orang sama. Sedangkan jika Gini Rasio bernilai satu, maka ketimpangan pengeluaran timpang sempurna atau pengeluaran itu hanya dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok saja. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 3. Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pengeluaran
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 – 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
> 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Gini ratio dalam hal ini mengukur kesenjangan sosial (dari ketimpangan pengeluaran). Menurut BPS, seseorang dikategorikan miskin atau tidak mampu, jika pendapatan perkapitanya di bawah garis kemiskinan. BPS juga menggunakan data kelompok penduduk 40% terbawah atau disebut juga dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%.

4.3. Indeks Theil & Williamson

Konsep entropi yang dikenal dengan nama indeks entropi Theil merupakan suatu aplikasi konsep untuk mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi memberikan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional, serta distribusi produk domestik bruto dunia. Dalam mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, indeks entropi Theil dapat dibagi dalam dua subindikasi, yaitu kesenjangan antar daerah dan kesenjangan dalam satu daerah. Indeks entropi Theil dapat digunakan untuk membuat perbandingan dengan kurun waktu tertentu dan

dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur ketimpangan secara rinci mengenai ketimpangan spasial. Jika nilai indeks entropi Theil besar, maka ketimpangan yang terjadi juga semakin besar. Demikian juga jika nilai indeks semakin kecil, berarti ketimpangan yang terjadi juga semakin kecil.

Fenomena ketimpangan yang terjadi di negara-negara berkembang, menurut *World Development Report* (Todaro, 2004), menunjukkan pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Memiliki kondisi standar hidup yang relatif rendah, hal ini terlihat dari kondisi pendapatan yang rendah, ketimpangan yang sangat besar terjadi antar wilayah, tingkat kesehatan yang relatif rendah, dan hanya sebagian orang yang mementingkan pendidikan; (2) Produktivitas rendah; (3) Peningkatan pendapatan sangat bergantung pada sektor pertanian dan bahan-bahan ekspor; (4) Peningkatan pertumbuhan penduduk diikuti peningkatan beban ketergantungan; (5) Ketergantungan pada hampir semua aspek terhadap hubungan internasional; dan (6) Keterbatasan informasi dan kebijakan pasar yang kurang mendukung kebutuhan masyarakat.

Entropi Theil antar wilayah (*between region*):

$$I(w) = \sum (Y_j) \log \left[\frac{Y_j}{X_j} \right]$$

Di mana:

$I(w)$: Indeks Entropi Theil antar wilayah

Y_j : Rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota j

X_j : Jumlah penduduk kabupaten/kota j

Entropi Theil dalam wilayah (*within region*):

$$I(y) = \sum \left(\frac{y_i}{Y_j} \right) \log \left[\frac{\frac{y_i}{Y_j}}{\frac{x_i}{X_j}} \right]$$

Di mana:

$I(y)$: Indeks Entropi Theil dalam wilayah

y_i : PDRB per kapita provinsi i

Y_j : Jumlah penduduk provinsi i

X_j : Jumlah penduduk kabupaten/kota j

Total Theil perkembangan wilayah di Provinsi Lampung adalah $I_{total} = I_{within} + I_{between}$.

Williamson (1965) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah – daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi di antar Propinsi Di Sumatera, 2011 - 2015 dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997: 31):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita Propinsi

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah di Sumatera

f_i = jumlah penduduk Propinsi

n = jumlah penduduk seluruh daerah di Sumatera

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti (Sjafrizal, 2008). Klasifikasi ketimpangan ekonomi (pendapatan) antar wilayah, menurut Williamson, adalah:

- Bila $IW < 0,3$: ketimpangan ekonomi wilayah rendah
 Bila $IW 0,3 - 0,5$: ketimpangan ekonomi wilayah sedang
 Bila $IW > 0,5$: ketimpangan ekonomi wilayah tinggi

Dengan menggunakan formula Indeks Theil dan Williamson tersebut di atas, hasil perhitungan indeks ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung menurut kabupaten/kota, berdasarkan pengeluaran per kapita disajikan secara *time series* (2012-2016) dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Indeks Theil dan Williamson Provinsi Lampung 2012-2016

Wilayah	2012		2013		2014		2015		2016	
	Theil	IW	Theil	IW	Theil	IW	Theil	IW	Theil	IW
Tanggamus	-0,009	0,101	-0,009	0,101	-0,009	0,102	-0,009	0,103	-0,009	0,104
Lampung Selatan	-0,016	0,006	-0,016	0,004	-0,016	0,002	-0,016	0,001	-0,016	0,002
Lampung Timur	-0,017	0,003	-0,017	0,010	-0,017	0,001	-0,017	0,005	-0,018	0,011
Mesuji	0,045	0,026	0,045	0,025	0,045	0,024	0,044	0,024	0,044	0,023
Tulang Bawang	0,019	0,277	0,018	0,276	0,018	0,274	0,017	0,271	0,017	0,269
Pesawaran	0,005	0,025	0,005	0,027	0,005	0,029	0,005	0,030	0,004	0,032
Pesisir Barat	0,021	0,043	0,020	0,044	0,020	0,045	0,020	0,046	0,019	0,046
Bandar Lampung	-0,012	0,091	-0,012	0,086	-0,012	0,086	-0,012	0,085	-0,012	0,084
Pesisir	<i>0,037</i>		<i>0,033</i>		<i>0,033</i>		<i>0,032</i>		<i>0,029</i>	
Lampung Barat	0,001	0,085	0,002	0,084	0,002	0,085	0,002	0,085	0,001	0,086
Lampung Tengah	-0,021	0,099	-0,021	0,096	-0,021	0,094	-0,021	0,092	-0,021	0,091
Lampung Utara	0,004	0,010	0,001	0,003	0,001	0,016	0,002	0,027	0,004	0,043
Way Kanan	-0,001	0,061	-0,001	0,064	-0,001	0,065	-0,001	0,066	-0,001	0,067
Pringsewu	0,007	0,061	0,004	0,057	0,004	0,045	0,005	0,039	0,007	0,031
Tlg. Bawang Barat	0,022	0,006	0,022	0,007	0,022	0,008	0,022	0,009	0,022	0,010
Metro	0,030	0,017	0,031	0,018	0,031	0,019	0,031	0,019	0,030	0,020
Non-Pesisir	<i>0,042</i>		<i>0,038</i>		<i>0,038</i>		<i>0,040</i>		<i>0,042</i>	
Lampung	0,079	0,351	0,0716	0,348	0,0716	0,345	0,0716	0,343	0,0717	0,343

Sumber: Balitbangda 2019 (*data diolah*)

Dari tabel di atas terlihat ketimpangan yang terjadi di wilayah pesisir di Provinsi Lampung lebih rendah dibanding wilayah nonpesisir, yang ditunjukkan dari hasil perhitungan Indeks Theil. Wilayah pesisir adalah kabupaten/kota di dalam wilayahnya terdapat kawasan berpesisir, seperti Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Bandar

Lampung. Sedangkan wilayah nonpesisir adalah kabupaten/kota yang tidak berpesisir, seperti Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Kota Metro. Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson secara umum berdasarkan katagorisasi ketimpangan Williamson, ketimpangan ekonomi wilayah Provinsi Lampung berada pada katagori sedang dengan indeks di bawah 0,5. Juga, tidak ada perbedaan signifikan tingkat ketimpangan ekonomi wilayah di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2012-2016.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah penting diarahkan bagaimana mengoptimalkan alokasi anggaran pembangunan untuk mendorong perekonomian di kabupaten dan kota. Potensi dan sumber daya daerah harus mampu dikelola untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Untuk itu, dibutuhkan skala prioritas yang tepat dan pemanfaatan fiskal daerah secara efektif dan efisien. Strategi alokasi anggaran pemerintah daerah ini perlu diarahkan untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk lebih menjamin pemerataan pembangunan daerah. Pengaruh merugikan akibat ketimpangan ekonomi antar daerah dapat diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah. Distribusi kekuatan di pasar antara pelaku ekonomi dengan modal besar dan ekonomi rakyat perlu dikelola oleh pemerintah daerah, sebelum menjadi persoalan yang serius di Provinsi Lampung.

4.4. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Alat analisis ini dapat digunakan melalui dua pendekatan: pertama adalah dengan pendekatan sektoral, sedangkan pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah/daerah seperti untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata

PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal. Kajian ini menekankan pada pendekatan kedua berupa pendekatan wilayah. Pendekatan wilayah menghasilkan empat klasifikasi kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu:

1. Daerah maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*/Kuadran I)

Daerah maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat.

2. Daerah berkembang cepat (*Growing Region* / Kuadran II)

Daerah berkembang cepat (*Growing Region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhannya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena di masa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

3. Daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region* / Kuadran III).

Kemudian daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada di bawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa di daerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan

masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya (Sjafrizal,1997).

4. Daerah maju tapi tertekan (*Retarded region*/Kuadran IV)

Daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi di masa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat , walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

Tabel 5. Pengelompokan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen

PDRB per Kapita (y)	$y_i < y$	$y_i > y$
Laju Pertumbuhan (r)		
$r_i > r$	(Kuadran II) Daerah Berkembang Cepat	(Kuadran I) Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
$r_i < r$	(Kuadran III) Daerah Relatif Tertinggal	(Kuadran IV) Daerah Maju Tapi Tertekan

Sumber : (Sjafrizal, 1997)

Keterangan :

y_i : pendapatan perkapita antar Propinsi

y : pendapatan perkapita Sumatera

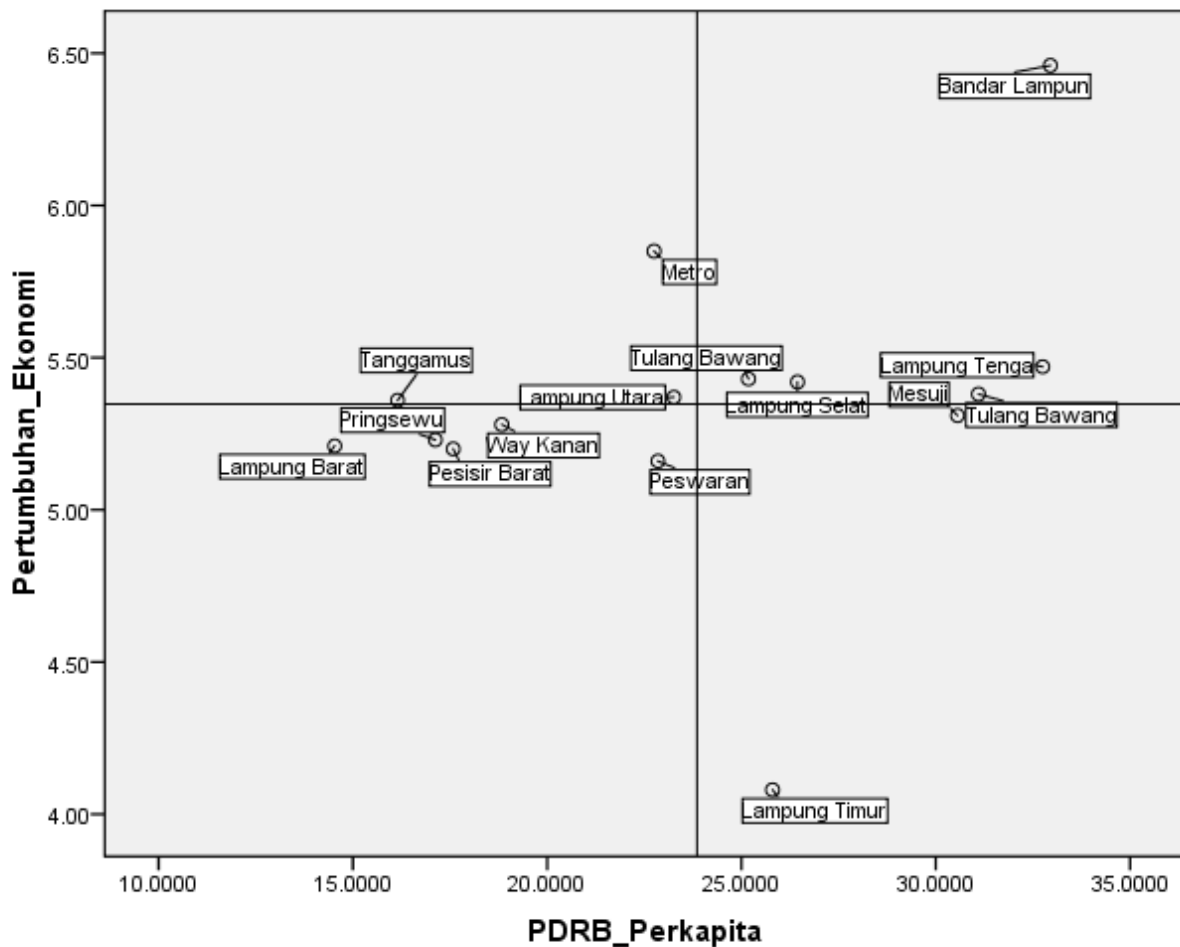
r_i : laju pertumbuhan PDRB antar Propinsi

r : laju pertumbuhan PDRB Sumatera

Hasil indentifikasi wilayah berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Lampung menurut kabupaten/kota, menunjukkan posisi 15 kabupaten dan kota berdasarkan empat kuadran. Kuadran I sebagai daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh,

adalah Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang Barat. Kuadran II sebagai daerah yang berkembang cepat, meliputi Metro, Tanggamus, dan Lampung Utara. Kuadran III yang merupakan daerah relatif tertinggal, yaitu Lampung Barat, Pesisir Barat, Pringsewu, Pesawaran, dan Way Kanan. Sedangkan daerah yang ada di Kuadran IV yang merupakan daerah maju tapi tertekan adalah Lampung Timur dan Mesuji.

Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini:



Sumber: Balitbangda, 2019 (diolah)

Gambar 6. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam Tipologi Klassen Klasifikasi pembangunan daerah berdasarkan tipologi kelas kabupaten dan kota di Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir (2014 – 2018) ditunjukkan dalam Tabel 6 dan 7 di bawah ini.

Tabel 6. Klasifikasi Wilayah Berdasar Laju Pertumbuhan dan Pendapatan per Kapita

Laju Pertumbuhan Pendapatan Pekapita	<i>Laju Pertumbuhan Di atas Rata-Rata</i>	<i>Laju Pertumbuhan Di bawah Rata-Rata</i>
<i>Pendapatan Perkapita Diatas Rata-Rata</i>	<i>Daerah Maju</i>	<i>Daerah Maju Tapi Tertekan</i>
<i>Pendapatan Perkapita Dibawah rata-Rata</i>	<i>Daerah Berkembang</i>	<i>Daerah Tertinggal</i>

Sumber: Balitbangda, 2019

Tabel 7. Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2014–2018

Laju Pertumbuhan Pendapatan Pekapita	<i>Laju Pertumbuhan Di atas Rata-Rata</i>	<i>Laju Pertumbuhan Di bawah Rata-Rata</i>
<i>Pendapatan Perkapita Diatas Rata-Rata</i>	Bandar Lampung, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat	Lampung Timur, Mesuji
<i>Pendapatan Perkapita Dibawah rata-Rata</i>	Metro, Tanggamus, Lampung Utara	Lampung barat, Pesisir Barat, Pringsewu, Pesawaran, Waykanan

Sumber: Balitbangda, 2019 (diolah)

Melihat sebaran klasifikasi kabupaten/kota berdasarkan Tipologi Klassen di atas (Gambar 6), terlihat konsentrasi kondisi daerah di sekitar garis vertikal dan horizontal yang saling berdekatan. Hanya terlihat Kota Bandar Lampung yang berada pada posisi pertumbuhan ekonomi tinggi dan PDRB per kapita juga tinggi. Ini menunjukkan kondisi kabupaten/kota pada masing-masing kuadran tersebut masih relatif rentan untuk berubah atau berpindah ke kuadran yang lain. Dengan kata lain, kabupaten yang berada pada kuadran I, misalnya, relatif rentan untuk

menjadi kabupaten dengan kondisi kuadran IV apabila pertumbuhan ekonominya menurun. Juga daerah yang berada di kuadran lain, bisa berubah posisi ke kuadran yang lebih rendah jika faktor-faktor lain berubah (pertumbuhan ekonomi dan atau PDRB per kapita mengalami penurunan), dan sebaliknya.

Data lain menunjukkan, pada 2017, terdapat 117 desa tertinggal yang tersebar di hampir semua kabupaten di Provinsi Lampung. Status desa tertinggal ini tentu menjadi indikasi bahwa pemerataan pembangunan belum terjadi secara optimal. Titik pertumbuhan di satu kabupaten belum mampu menggerakkan seluruh wilayah (desa) untuk maju bersama. Data desa tertinggal di Provinsi Lampung (2017) ditunjukkan dalam Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Desa Tertinggal di Provinsi Lampung 2017

NO	KABUPATEN	KECAMATAN		DESA	
1	Lampung Barat	Bandar Negeri Suoh	1	Tembelang	
2		Batu Brak		1	Kerang
3				1	Teba Liyokh
4				1	Atar Bawang
5		Batu Ketulis		1	Sumber Rejo
6				1	Atar Kuwau
7				1	Serungkuk
8		Belalau		1	Pajar Agung
9				1	Suka Makmur
10				1	Pagar Dewa
11		Pagar Dewa		1	Suka Mulya
12				1	Batu Api
13				1	Tiga Jaya
14		Sekincau		1	Bumi Jaya
15		Sukau		1	Sidorejo
16		Suoh		1	Suka Maju
17		Lumbok Seminung		1	Lombok Selatan
18				1	Suka Banjar II
19				1	Ujung Rembun
20	1			Pancur Mas	
21	Lampung Tengah	Pubian	1	Pekandangan	
22		Bandar Surabaya	1	Cabang	
23	Lampung Utara	Abung Barat	1	Pengaringan	
24		Abung Pekurun		1	Sumber Tani
25				1	Campang Gijul
			1	Sinar Gunung	

26		Abung Tengah	1	Gunung Gijul
27		Kotabumi Selatan	1	Sinar Mas Alam
28		Muara Sungkai	1	Negeri Ratu
29		Sungkai Jaya	1	Sukajaya
30			1	Cahaya Makmur
31		Tanjung Raja	1	Sido Mulyo
32	Lampung selatan	Raja basa	1	Hargo Pancoran
33		Tanjung Bintang	1	Sukanegara
34			1	Srikaton
35	Pesawaran	Way Ratai	1	Harapan Jaya
36		Kedondong	1	Babakan Loa
37		Punduh Pidada	1	Pulau Legundi
38	Pringsewu	Pagelaran Utara	1	Way Kunir
39	Pesisir Barat	Bengkunat	1	Mulang Maya
40		Bengkunat Belimbing	1	Sumber Rejo
41			1	Bandar Dalam
42			1	Way Tias
43			1	Siring Gading
44		Karya Penggawa	1	Tembakak Way Sindi
45			1	Way Sindi Hanuan
46			1	Way sindi Utara
47			1	Asahan Way Sindi
48			1	Penengahan
49		Lemong	1	Parda Haga
50			1	Suka Mulya
51			1	Way Batang
52			1	Cahaya Negeri
53		Ngambur	1	Pekon Mon
54			1	Suka Banjar
55		Pesisir Selatan	1	Pagar Dalam
56		Pesisir Utara	1	Kerbang Dalam
57			1	Gedau
58		Pulau Pisang	1	Labuhan
59			1	Bandar Dalam
60			1	Pekon Lok
61	Way Kanan	Blambangan Umpu	1	Tanjung Raya Giham
62			1	Ojo Lali
63			1	Segara Midar
64			1	Gunung Pekuwon
65			1	Sinar Gading
66			1	Karang Lantang

67			1	Karta Jaya
68		Negeri Agung	1	Gedung Menang
69		Negeri Besar	1	Negeri Kasih
70	Tulang Bawang	Dente Teladas	1	Sungai Burung
71		Rawajitu Selatan	1	Karya Cipta Abadi
72		Gedung Meneng	1	Bakung Ilir
73			1	Gedung Meneng Baru
74		Menggala Timur	1	Sungai Luar
75			1	Bedarou Indah
76		Meraksa Aji	1	Marga Jaya
77		Rawa Pitu	1	Bumi Sari
78		Tulang Bawang Barat	Gunung Terang	1
79	1			Terang Mulya
80	Pagar Dewa		1	Bujung Dewa
81	Mesuji		1	Wiralaga Mulya
82	Mesuji	Panca Jaya	1	Fajar Asri
83			1	Panggung Rejo
84			1	Sidang Muara Jaya
85			1	Sungai Sidang
86		Tanjung raya	1	Kagungan dalam
87			1	Tanjung Harapan
88			1	Mukti Jaya
89			1	Sri Tanjung
90	Tanggamus	Bandar Negeri Semuong	1	Simpang Bayur
91			1	Tulung Sari
92			1	Atar Lebar
93		Cukuh Balak	1	Tanjung Jati
94			1	Tanjung Raja
95			1	Karang Buah
96			1	Sukaraja
97			1	Gedung
98			1	Kuta Kakhang
99			1	Suka Banjar
100		Kelumbayan	1	Pekon Unggak
101			1	Pekon Susuk
102			1	Negeri Kelumbayan
103		Kelumbayan Barat	1	Batu Patah
104		Pematang Sawa	1	Way Asahan
105			1	Tampang
106			1	Kaur Gading
107			1	Tirom
108			1	Teluk Brak
109			1	Matanda

110			1	Pesangan
111		Pugung	1	Talang Lebar
112			1	Gading
113			1	Sukamulya
114			1	Taman Sari
115		Semaka	1	Margo Mulyo
116		Ulu Belu	1	Petay Kayu
117		Wonosobo	1	Simpang Turus

Sumber: BPS, 2018.

Dengan kondisi tersebut, kesenjangan pembangunan merupakan persoalan pada setiap jenjang pemerintahan. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan kesenjangan di antara desa/kecamatan yang ada dalam wilayahnya, sembari terus meningkatkan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota. Begitu pula pemerintah provinsi harus memberikan perhatian untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di setiap kabupaten/kota dalam wilayahnya, sambil terus meningkatkan pembangunan ekonomi dan daya saing pada provinsi bersangkutan. Juga, pada tingkat nasional. Pusat-pusat pertumbuhan yang ada di satu daerah harus digerakkan untuk menarik pertumbuhan di daerah-daerah sekitarnya. Pusat pertumbuhan tidak boleh memonopoli atau menyedot sumber daya pembangunan, sehingga daerah lain terabaikan dan semakin tertinggal.

BAB V

HASIL PEMBAHASAN

Pemerataan pembangunan yang menjadi salah satu semangat desentralisasi belum sepenuhnya terwujud sesuai harapan. Ketimpangan yang dicerminkan dari indeks gini masih terjadi di daerah. Meski ketimpangan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam katagori sedang menurut Indeks Williamson, tetapi potensi untuk semakin senjang perlu diantisipasi sejak dini. Terlebih melihat masih relatif tingginya angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal di daerah ini. Strategi optimalisasi fiskal daerah perlu diperkuat dalam pengelolaan potensi dan sumber daya daerah, dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat, dan pemerataan pembangunan yang semakin baik. Dengan begitu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di daerah.

Berdasarkan Tipologi Klassen terhadap kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kuadran I sebagai daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, adalah Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang Barat. Daerah-daerah tersebut adalah kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata daerah dalam wilayahnya. Kabupaten/kota dalam kuadran ini relatif lebih maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang relatif besar dan mampu dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat.

Kabupaten dan kota yang termasuk dalam Kuadran II Tipologi Klassen sebagai daerah yang berkembang cepat, meliputi Metro, Tanggamus, dan Lampung Utara. Daerah yang termasuk dalam kuadran ini secara umum memiliki potensi

pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara optimal. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhannya tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Pada masa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

Kuadran III yang merupakan daerah relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Pringsewu, Pesawaran, dan Way Kanan. Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut masih relatif rendah. Namun, ini tidak berarti bahwa daerah-daerah tersebut tidak memiliki potensi untuk berkembang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian dan infrastruktur daerah, peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat setempat, merupakan upaya-upaya krusial yang diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan di daerah-daerah tersebut secara lebih optimal dan secara bertahap mengejar ketertinggalannya.

Sedangkan kabupaten yang ada pada Kuadran IV yang merupakan daerah maju tapi tertekan adalah Lampung Timur dan Mesuji. Daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dari rata-rata daerah lain. Daerah maju tapi tertekan (*retarded region*) ini merupakan daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan perekonomian utama di daerah yang bersangkutan. Daerah-daerah dalam kuadran ini memiliki potensi yang cukup besar untuk maju, tetapi diperkirakan dengan kondisi yang ada pertumbuhannya tidak akan lebih cepat dibanding daerah-daerah yang lain.

Meski dengan menggunakan Tipologi Klassen kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dapat diklasifikasikan dalam empat kuadran tersebut di atas, tetapi kondisi daerah-daerah tersebut tidak berbeda secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak terlalu jauh perbedaannya, sehingga letak antarkabupaten dalam diagram Klassen juga cenderung saling berdekatan. Adanya sedikit perubahan (peningkatan atau penurunan) dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita satu daerah, akan bisa merubah posisi kabupaten dalam klasifikasi Klassen tersebut. Hanya Kota Bandar Lampung yang terlihat jauh di atas rata-rata daerah lain dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya. Sedangkan Kabupaten Lampung Timur yang paling rendah pertumbuhannya.

Berdasarkan katagorisasi ketimpangan Williamson secara umum ketimpangan ekonomi wilayah Provinsi Lampung berada pada katagori sedang dengan indeks di bawah 0,5. Juga, tidak ada perbedaan signifikan tingkat ketimpangan ekonomi wilayah di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2012-2016. Selain ketimpangan di antara (*between*) kabupaten dan kota dalam satu provinsi, ketimpangan di dalam (*within*) kabupaten juga terjadi, yang ditunjukkan dengan masih adanya desa-desa tertinggal di hampir semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, upaya pemerataan pembangunan melalui kebijakan dan kegiatan yang tepat, penting untuk menjadi perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka itu, kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah agar ketimpangan tidak semakin parah, antara lain, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada daerah-daerah yang relatif tertinggal. Daerah yang sudah lebih maju bisa didesain untuk menjadi pengungkit atau pendorong bagi pembangunan daerah-daerah di sekitarnya. Peran kabupaten/kota yang termasuk daerah yang sudah maju, antara lain, dapat memberikan dukungan berupa program peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan modal sosial (*human capital*) yang akan ikut serta mendorong pertumbuhan di daerah-daerah sekitarnya. Dengan meningkatnya kualitas

pendidikan dan modal sosial berupa sumber daya manusia yang terdidik dan kreatif, diharapkan memberikan dampak positif melalui penyebaran ide dan inovasi, serta tumbuhnya kewirausahaan secara lebih luas. Daerah-daerah yang relatif belum maju, juga memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan.

Integrasi kebijakan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan efektivitasnya, sehingga lahir program dan kegiatan pembangunan dengan arah yang jelas, efektif, dan tidak tumpang tindih. Dengan begitu, sumber daya pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Dengan integrasi dan sinergi kebijakan yang baik tersebut, ketimpangan pembangunan ekonomi maupun kesenjangan sosial dapat diminimalisir. Desentralisasi dan otonomi daerah jangan sampai justru menjadi penghambat (*obstacle*) dalam mengintegrasikan dan mensinergikan kebijakan atau program/kegiatan pembangunan. Prioritas pembangunan infrastruktur transportasi yang digesa pemerintah dalam lima tahun terakhir ini juga harus mampu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah-daerah yang relatif tertinggal. Konektivitas yang meningkat tersebut akan memberikan manfaat optimal apabila diimbangi meningkatnya kapasitas SDM di setiap daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan, dan keamanan juga harus menjadi perhatian penting pemerintah daerah.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu didorong dengan meningkatkan kapasitas dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada dalam rangka menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Paradigma yang perlu dikembangkan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya ini adalah paradigma kolaboratif atau dalam teori administrasi dan kebijakan publik dikenal juga dengan istilah *collaborative governance*. Pendekatan kolaboratif ini penting dikembangkan untuk mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan secara efektif. Paradigma otonomi daerah sebagai kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri-sendiri, perlu dimodifikasi dengan kesadaran bahwa setiap

daerah tidak bisa mengembangkan daerahnya secara optimal jika dilakukan secara sendiri. Satu daerah membutuhkan daerah lain untuk tumbuh, berkembang, dan maju. Pemerintah membutuhkan entitas sosial dan ekonomi lain untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan. Dengan kondisi kesenjangan kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang belum tinggi, ini menjadi modal awal untuk dapat terbangunnya kolaborasi antar kabupaten/kota, di mana pemerintah provinsi dapat memainkan peran memfasilitasi dan mensupervisinya. Karena, kesenjangan yang terlalu lebar akan menyulitkan proses kolaborasi.

Menurut Sjafrizal (2009) terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah sangat penting untuk mempercepat realisasi pembangunan di daerah. Namun, koordinasi antarkepada daerah kurang berjalan efektif dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota memiliki egosektoral, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dalam kondisi demikian, dibutuhkan pemetaan akan kebutuhan dari masing-masing wilayah, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terpadu dan proporsional. Sinkronisasi dan integrasi juga harus terencana secara jelas dan terarah dan mewakili semua kepentingan wilayah.

Upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tata kelola anggaran daerah. Kondisi saat ini, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan APBD terhadap transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 12,87% (*detiknews*, 30/1/19). Secara implisit, pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya. Ironisnya, ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah kabupaten/kota. Padahal, level kabupaten/kota inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana dimaksud UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pidato di depan Sidang Paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga strategi dalam mencapai target fiskal pada 2020, yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi; meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas; dan mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal (*dpr.go.id*, 16/08/2019). Tiga strategi tersebut diarahkan pada lima program utama: (1) Penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera; (2) Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (3) Penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi danantisipasi aging population; (4) Penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah; dan (5) Antisipasi ketidakpastian global.

Di Provinsi Lampung, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki janji kerja untuk periode 2019-2024, yang manfaatnya antara lain juga dalam rangka mengatasi ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota. Janji kerja tersebut, antara lain, mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi program Kartu Petani Berjaya (KPB); revitalisasi lada; meningkatkan daya saing kopi, kakao, dan komoditas unggulan lain; program nelayan berjaya; memfungsikan BUMD; mempercepat pembangunan pariwisata; mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM, dan koperasi; serta pendampingan program pembangunan desa. Dalam bidang pendidikan, pemerintah provinsi akan menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa pertanian berprestasi; insentif guru honorer dan PAUD; Lampung Mengaji; revitalisasi SMK; serta Lampung ramah perempuan dan anak. Dalam bidang infrastruktur, akan dibangun infrastruktur Lampung Berjaya; Lampung terang Berjaya; dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kesejahteraan rakyat. Juga dalam bidang kesehatan telah dicanangkan program Lampung Sehat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

- Ketimpangan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam katagori sedang menurut Indeks Williamson, tetapi potensi untuk semakin senjang perlu diantisipasi sejak dini. Terlebih melihat masih relatif tingginya angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal di daerah ini. Strategi optimalisasi fiskal daerah perlu diperkuat dalam pengelolaan potensi dan sumber daya daerah, dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat, dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik.
- Berdasarkan Tipologi Klassen, Kuadran I sebagai daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, adalah Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang Barat. Daerah-daerah tersebut adalah kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata daerah dalam wilayahnya. Daerah-daerah ini mempunyai potensi yang relatif besar untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat setempat.
- Kuadran II Tipologi Klassen sebagai daerah yang berkembang cepat, meliputi Metro, Tanggamus, dan Lampung Utara. Daerah yang termasuk dalam kuadran ini secara umum memiliki potensi pengembangan yang besar, tetapi masih belum diolah secara optimal. Maka, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi pendapatan per kapitanya masih relatif rendah. Pada masa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

- Kuadran III yang merupakan daerah relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Pringsewu, Pesawaran, dan Way Kanan. Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*) ini adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Namun, tidak berarti daerah-daerah ini tidak memiliki potensi untuk berkembang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian dan infrastruktur daerah, peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat setempat, merupakan upaya-upaya krusial yang diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan di daerah-daerah tersebut secara lebih optimal dan secara bertahap mengejar ketertinggalannya.
- Pada Kuadran IV yang merupakan daerah maju tapi tertekan ada Lampung Timur dan Mesuji. Daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata daerah lain. Daerah-daerah dalam kuadran ini memiliki potensi yang cukup besar untuk maju, tetapi diperkirakan dengan kondisi yang ada pertumbuhannya tidak akan lebih cepat dibanding daerah-daerah yang lain.
- Secara umum, kondisi kabupaten/kota di Provinsi Lampung tidak berbeda secara signifikan. Pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu jauh perbedaannya, sehingga letak antarkabupaten dalam diagram Klassen juga cenderung saling berdekatan. Hanya Kota Bandar Lampung yang terlihat jauh di atas rata-rata daerah lainnya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya. Sedangkan Kabupaten Lampung Timur yang paling rendah pertumbuhan ekonominya.
- Berdasarkan katagorisasi ketimpangan Williamson secara umum ketimpangan ekonomi wilayah Provinsi Lampung berada pada katagori sedang dengan indeks di bawah 0,5. Juga, tidak ada perbedaan signifikan tingkat ketimpangan ekonomi wilayah di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2012-2016. Selain ketimpangan di antara

(*between*) kabupaten dan kota dalam satu provinsi, ketimpangan di dalam (*within*) kabupaten juga terjadi, yang ditunjukkan dengan masih adanya desa-desa tertinggal di hampir semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Upaya pemerataan pembangunan melalui kebijakan dan kegiatan yang tepat, penting untuk menjadi perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

6.2. Saran

- Kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Provinsi Lampung agar ketimpangan tidak semakin parah, antara lain, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada daerah-daerah yang relatif tertinggal. Daerah yang sudah lebih maju bisa didesain untuk menjadi pengungkit atau pendorong bagi pembangunan daerah-daerah di sekitarnya.
- Peran kabupaten/kota yang termasuk daerah yang sudah maju, dapat memberikan dukungan berupa program peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan modal sosial (*human capital*) yang akan ikut serta mendorong pertumbuhan daerah-daerah sekitarnya. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan modal sosial berupa sumber daya manusia yang terdidik dan kreatif, diharapkan berdampak positif melalui penyebaran ide dan inovasi, serta tumbuhnya kewirausahaan secara lebih luas. Daerah-daerah yang relatif belum maju, juga memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan.
- Pada daerah dalam Kuadran I, strategi kebijakan yang dapat diambil, antara lain, peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian, penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif, pengembangan fungsi sebagai daerah penghubung (*hub*), dan peningkatan kualitas pendidikan. Daerah yang termasuk dalam Kuadran II, dapat mengembangkan strategi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan, dan

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Daerah dalam Kuadran III dapat mengarahkan kebijakan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana daerah, pengembangan kawasan industri, dan penciptaan iklim usaha yang baik. Daerah dalam Kuadran IV perlu mengarahkan kebijakan pembangunan pada peningkatan sarana dan prasarana di daerah, pengembangan kawasan industri, penciptaan iklim investasi yang baik, perluasan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses dan mutu pendidikan, pengembangan pusat pertumbuhan baru, serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

- Integrasi kebijakan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan efektivitasnya, sehingga lahir program dan kegiatan pembangunan dengan arah yang jelas, efektif, dan tidak tumpang tindih. Desentralisasi dan otonomi daerah jangan sampai justru menjadi penghambat (*obstacle*) dalam mengintegrasikan dan mensinergikan kebijakan atau program/kegiatan pembangunan. Pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan, dan keamanan juga harus menjadi perhatian penting pemerintah daerah.

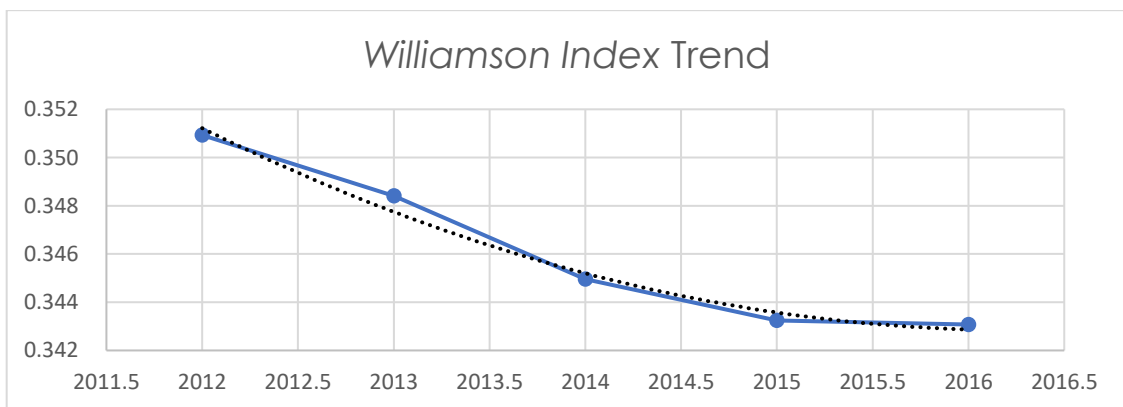
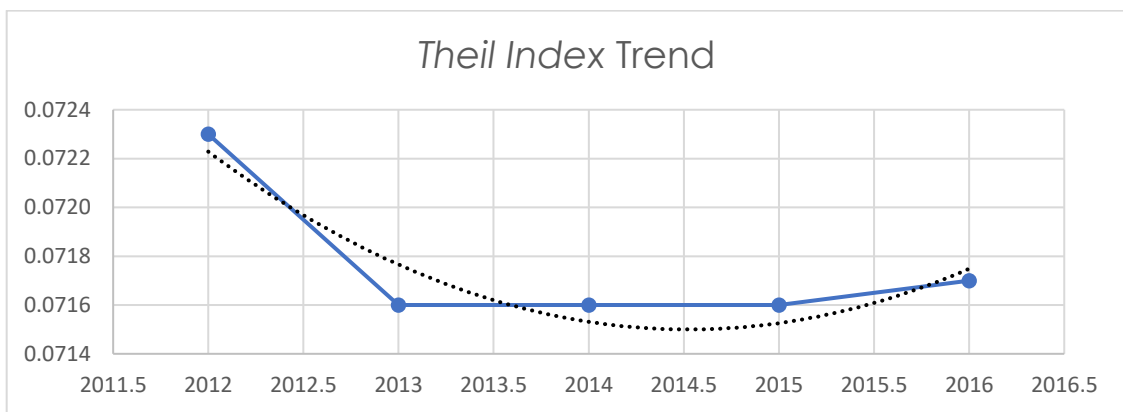
- Paradigma yang perlu dikembangkan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya di daerah adalah paradigma kolaboratif atau dalam teori administrasi dan kebijakan publik dikenal dengan istilah *collaborative governance*. Pendekatan kolaboratif ini penting dikembangkan untuk mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan secara efektif. Dengan kesenjangan yang belum tinggi, ini menjadi modal awal untuk terbangunnya kolaborasi antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, di mana pemerintah provinsi dapat memainkan peran memfasilitasi dan mensupervisinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Jogjakarta.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Analisis Spasial dan Regional*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sjafrizal. 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat", *Prisma*, LP3ES, Nomor 3, 27-38.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*, LPFE UI, Jakarta.
- Tarigan, R. 2003. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Jakarta: Erlangga.

LAMPIRAN

PERBANDINGAN TREN KETIMPANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
MENGUNAKAN INDIKATOR INDEKS THEIL DAN INDEKS WILLIAMSON
SELANG WAKTU 2011 - 2015



Sumber: Balitbangda Provinsi Lampung.2019 (diolah).

33 JANJI KERJA ARINAL-NUNIK “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

1. Kartu Petani Berjaya (KPB). Memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan:
 - a. Kepastian mendapatkan benih/bibit, pupuk, pestisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani.
 - b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani.
 - c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani.
 - d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi.
 - e. Jaminan sosial bagi petani lansia.
2. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
3. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu.
4. Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan.
5. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri.
6. Program Nelayan Berjaya: Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan:

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
 - b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
 - c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia.
 - d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
 - e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra pertambakan.
7. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategis bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta Pemerintahan Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar.
 8. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan:
 - a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung.
 - b. Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia.
 - c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata.
 - d. Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui).
 9. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi

masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.

10. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional.

11. Infrastruktur Lampung Berjaya.

- a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antar Kabupaten/Kota.
- b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya.
- c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

12. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat:

- a. Berbasis peran serta warga dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermurah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur.
- b. Memperkuat sumber daya manusia dan sumber daya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap, dan tepat.
- c. Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong.

13. Lampung Terang Berjaya. Memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus pada:

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik.
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air, dan gas bumi.
- c. Kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian

14. Mengelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat:

- a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan.
- b. Mengorientasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan.

15. Lampung Merawat Indonesia. Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.

16. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Mesjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Mesjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

17. Lampung Mengaji. Memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al Qur'an dengan memberikan bantuan fasilitas khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pondok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an Lampung.

18. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan:

- a. Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis startup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMA dan SMK.
- c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatan kapasitas lainnya.

19. Revitalisasi SMK. Mengintegrasikan SMK ke dunia kerja dengan:

- a. Memperluas kerja magang sebagai bagian kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha.
- b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri.
- c. Memfasilitasi kemitraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi.

20. Lampung Menuju Bebas Narkoba.

- a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama.
- b. Memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan.
- c. Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi.

21. Perempuan Berjaya:

- a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga.

- b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi.
 - c. Memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan.
22. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.
23. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui:
- a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal.
 - b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usaha dan pemasaran.
 - c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan.
 - d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota).
24. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan:
- a. Menyederhanakan perizinan.
 - b. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha.
 - c. Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan.
 - d. Memfasilitasi sinergi di antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi.
25. Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan Kementerian

Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.

26. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten dan Kota), dengan:

- a. Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak.
- b. Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak.
- c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.
- d. Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta, dan ruang publik.
- e. Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak.
- f. Memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu.

27. Anak Muda Berjaya:

- a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antar kalangan muda berbasis komunitas.
- b. Menggalakkan “Gerakan Malu Menganggur” di kalangan muda.
- c. Mencetak wirausaha muda.
- d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak Muda di Kabupaten/Kota.

28. Lampung Sehat:

- a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas.
- b. Memperkuat peran Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit

29. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada:

- a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga.
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi.
- c. Memperbaiki tata kelola organisasi olah raga melalui penempatan personal yang berkompeten.

30. Smart Village.

- a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa.
- b. Memfasilitasi digitalisasi administrasi desa.
- c. e-participation: melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan/atau aplikasi.

31. Pendampingan program pembangunan desa.

- a. Memberikan fasilitas pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa.

- b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
32. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan:
- a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi.
 - b. Menciptakan sistem penjenjangan karier melalui fit and proper test berbasis kompetensi.
 - c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/Kota) dan asas keadilan.
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur.
Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja.
 - e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset-aset Pemerintah Provinsi.
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - g. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha.
 - h. Membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
33. APBD Rakyat Berjaya:
- a. Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan publik.
 - b. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.